

SKRIPSI

ITERPRETASI UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI DI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) BERBENTUK PERSERO



Disusun Oleh :

WILIBRODUS HARUM

NPM : 110510561

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
ITERPRETASI UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI DI BADAN USAHA MILIK
NEGARA (BUMN) BERBENTUK PERSERO



Disusun Oleh :
WILIBRODUS HARUM

NPM : 110510561
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Disetujui Pada Tanggal *26 Januari 2015*

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Al. Wisnubroto", is written over a horizontal line.

DR. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**ITERPRETASI UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI DI BADAN USAHA MILIK NEGARA
(BUMN) BERBENTUK PERSERO**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 14 Januari 2015
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

Susunan Tim Penguji :

Ketua : DR. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum
Sekretaris : St. Harum Pudjiarto, S.H., M. Hum
Anggota : Anny Retnowati, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum**

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



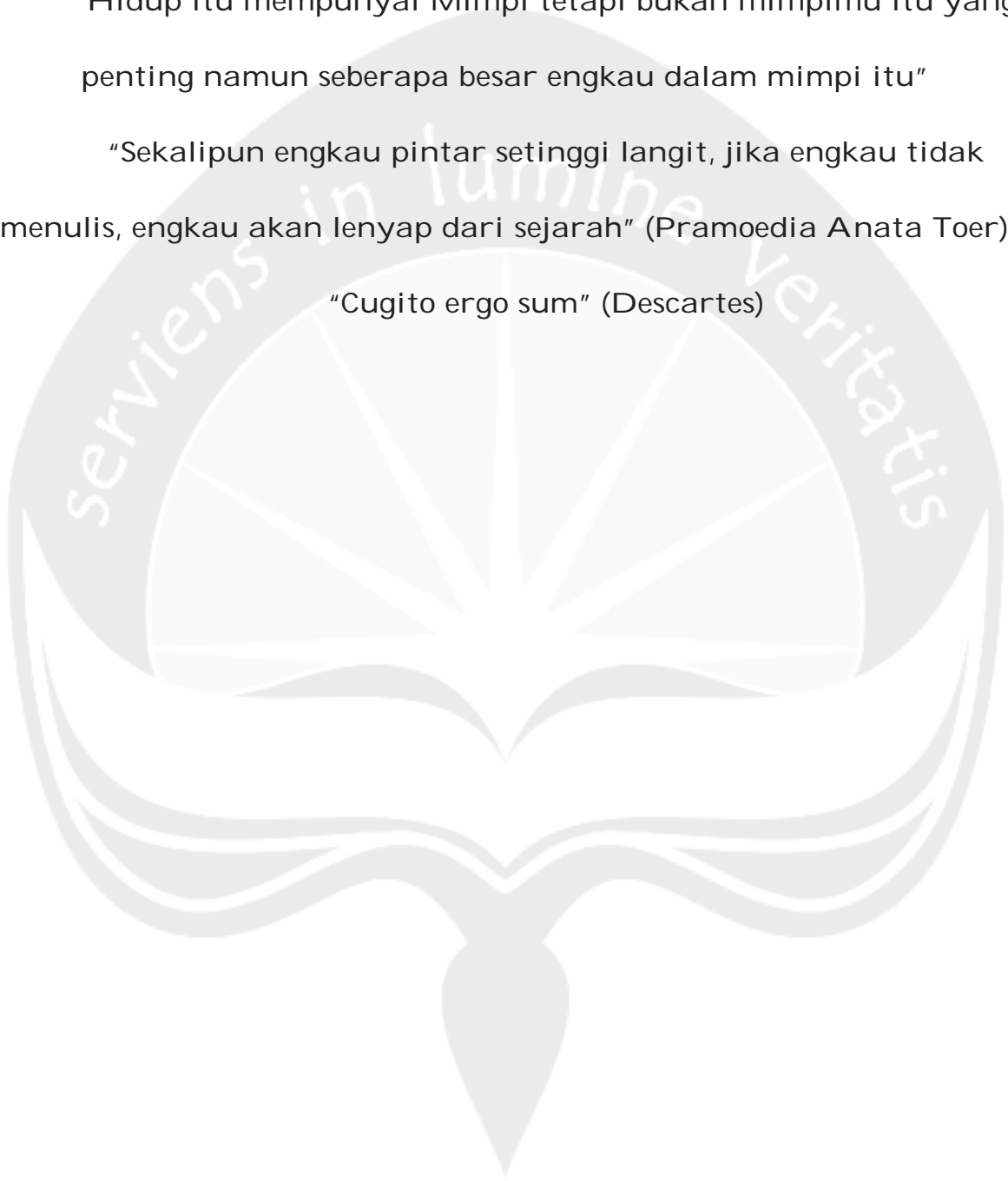
Dr. G. Sri Nurhantanto SH., L.LM

HALAMAN MOTTO:

"Hidup itu mempunyai Mimpi tetapi bukan mimpimu itu yang penting namun seberapa besar engkau dalam mimpi itu"

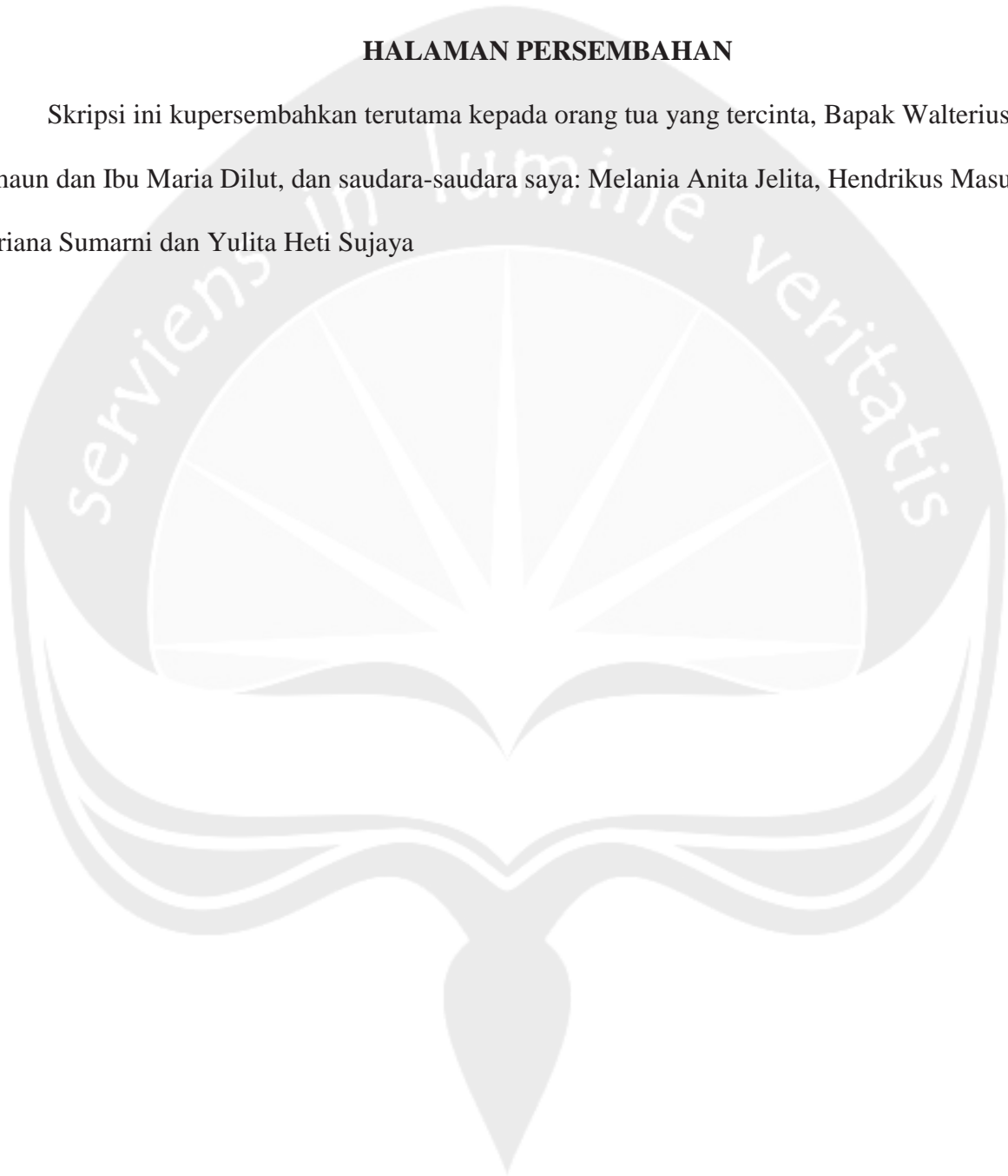
"Sekalipun engkau pintar setinggi langit, jika engkau tidak menulis, engkau akan lenyap dari sejarah" (Pramoedia Anata Toer)

"Cugito ergo sum" (Descartes)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan terutama kepada orang tua yang tercinta, Bapak Walterius Jemaun dan Ibu Maria Dilut, dan saudara-saudara saya: Melania Anita Jelita, Hendrikus Masur, Coriana Sumarni dan Yulita Heti Sujaya



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Desember 2014

Yang menyatakan,

Wilibrodus Harum

KATA PENGANTAR

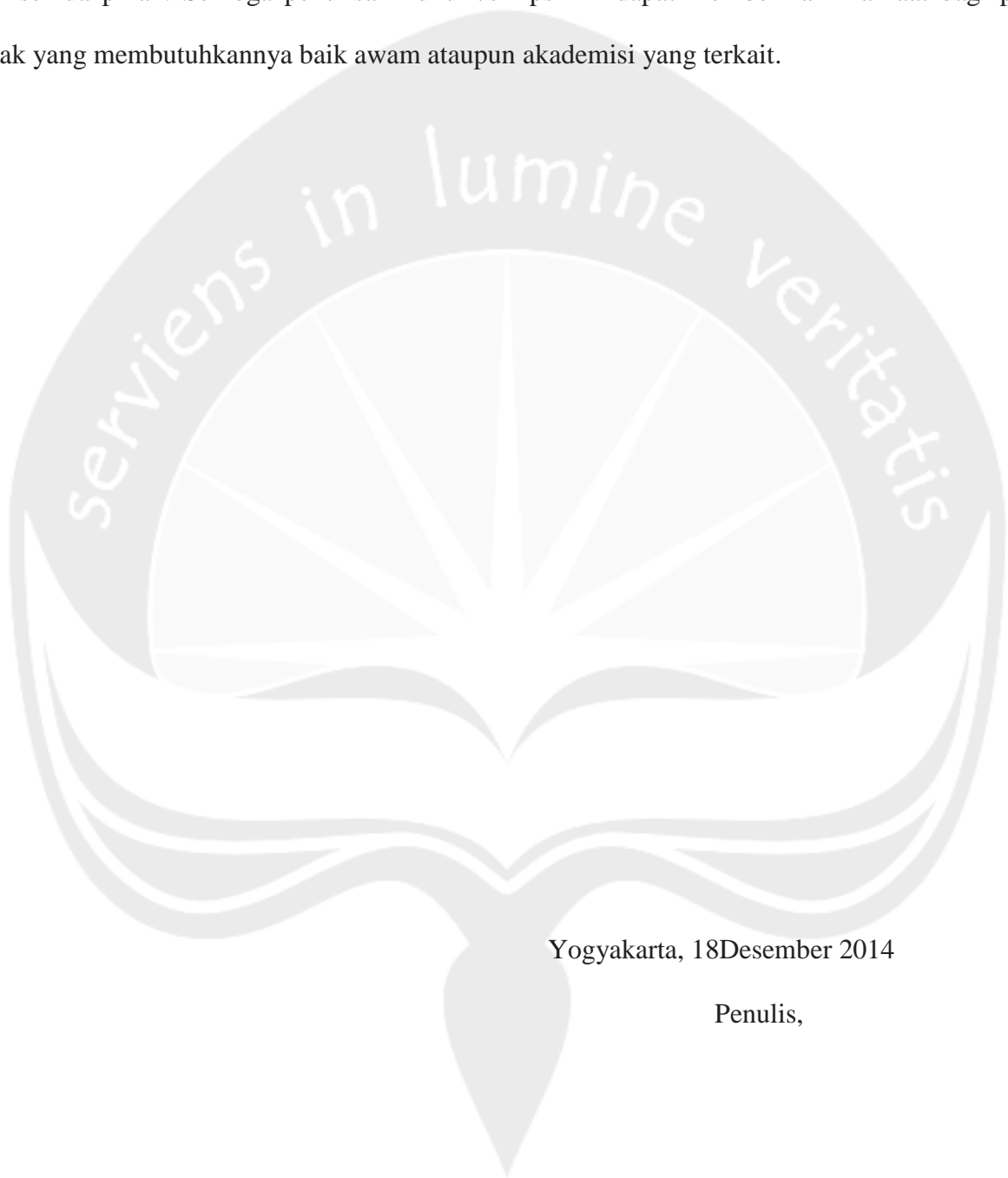
Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan KasihNya yang melimpah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Interpretasi Unsur Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Terjadi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berbentuk Persero, yang merupakan syarat untuk menempuh derajat keserjanaan dalam bidang hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Oleh sebab itu, dengan segala hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. AL. Wisnubroto, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan pengarahan dan masukan selama proses penyusunan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Oce Madril, S.H., M.H, selaku Nara Sumber yang berprofesi sebagai aktivis pada PUKAT Korupsi UGM yang telah meluang waktunya untuk diwawancarai sekaligus memberikan masukan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Suwarno, S.H., M.Hum, selaku nara sumber yang berprofesi sebagai hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah bersedia diwawancarai oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Nanik Kushartanti, S.H.,M.H, selaku nara sumber yang berprofesi sebagai Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta yang telah bersedia diwawancarai oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Papa dan mama yang telah menghabiskan banyak biaya dan tenaga untuk mendukung saya dalam menempuh sarjana di Fakultas Hukum Universitas Atma jaya Yogyakarta.
8. Kakak Melania Anita jelita, Hendrikus Masur, Maria Coriana Sumarni, yang telah memberikan banyak bantuan baik berupa materiil maupun moril sepanjang saya mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
9. Semua Teman-teman di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Welfare crew (Ibel, Sugeng, Anes, Iron, Atno, Ryansah, Hendrik, Feliks Alfian, Ega, dani, Agung, Glory, Papi Edi, Agung), WBO (Boy, Ongki, Marwin, Ody, Dika, Wilson, Thomas, Agil, Herman, Jos) LMN, dan SMITT yang selalu bersama dengan saya dalam diskusi, berpetualang, Futsal dan berbagai kegiatan lain yang selalu menjadi serpihan-serpihan kisah yang tak mudah untuk dilupakan.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam doa untuk proses penulisan hukum/skripsi ini hingga terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis menerima berbagai macam kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Semoga penulisan hukum/skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang membutuhkannya baik awam ataupun akademisi yang terkait.



Yogyakarta, 18Desember 2014

Penulis,

Wilibrodus Harum

ABSTRACT

The element of country's financial loss which is the offence group found an article 2 and article 3 act No. 31 of 1999 on the eradication of corruption, in its application often call up problem, especially relating to corruption case which happened in the state owned enterprises limited. The presence of double standar in legislation leads to polemic whether the country's financial investing in the state Owned Enterprises Limited is still becoming a part of country's financial or it is changing to the State Owned Enterprises Limited's financial. That polemic becomes the main problem on this research. Moreover, the researcher would like to analyze how the judge interpreted the element of prejudicing the country's financial of the case happening in the state owned enterprises limited.

The problem whether the state owned Enterprises Limited's financial is part of country's financial or not, normative-juridically has been answered by the constitutional Court Ruling Republic Of Indonesia No. 48/PUU-XI/2013 and the constitutional court Ruling of Indonesia No. 62/PUU-IX/2013 which essentially states that the states Owned Enterprises Limited's financial is still a part of the country's financial. Before the constitutional court issued ruling that the country's financial in the state Owned Enterprises Limited is still a part of country's financial, the judge in the Court of Corruption case often interpret the element "harm the country's financial differently or diverse so that it creates a disparity of the judge's Decision.

Keyword: interpret, country's financial loss, country's financial State Owned Enterprises Limited.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	7
G. Metode Penelitian.....	8
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	14
BAB II PEMBAHASAN.....	12
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi	16
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi ..	16

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	16
3. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	24
B. Keuangan Negara Dalam BUMN Persero.....	
1. Keuangan Negara	29
a. Pengertian Keuangan Negara.....	29
b. Ruang Lingkup Keuangan Negara	32
c. Perihal Kerugian Keuangan negara	34
2. BUMN Persero.....	
a. Pengertian BUMN	34
b. Maksud dan Tujuan BUMN Persero	36
c. BUMN Persero Sebagai Badan Hukum	51
d. Modal BUMN Persero	57
e. Kekayaan Negara Dipisahkan pada BUMN Persero	57
f. Status Yuridis Keuangan Negara dalam BUMN Persero.....	63
C. Analisis Penafsiran Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Perkara yang Terjadi BUMN Persero.....	79
D. Penafsiran Hakim terkait Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Perkara yang Terjadi BUMN Persero.....	

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....	
B. Saran	

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

